



Kepemimpinan Trump, America First, dan Nasionalisme Pertahanan: Relevansinya Terhadap Strategi Logistik dan Kemandirian TNI

Fadjar Wahyudi Broto, I Ketut Bina S, Nurhidayat, Tuwadi, Tarsisius Susilo

Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia

Email: fadjar054@gmail.com, binaketutbina@gmail.com, muchus70@gmail.com,
tuwadi2000@yahoo.com, kolhidayat123@gmail.com

Kata Kunci

Kepemimpinan
Trump, America
First, nasionalisme
pertahanan,
kemandirian
logistik, strategi
TNI

Abstrak

Kajian ini menganalisis kepemimpinan Donald Trump melalui kebijakan America First yang menekankan proteksi industri strategis, khususnya sektor pertahanan dan energi, serta relevansinya bagi Indonesia dalam membangun kemandirian logistik dan memperkuat strategi pertahanan nasional. Latar belakang penelitian ini berpijak pada orientasi proteksionis Trump yang menempatkan kepentingan domestik di atas agenda internasional, yang secara praktis memengaruhi dinamika geopolitik dan ekonomi global. Tujuan penelitian ini adalah mengeksplorasi keterkaitan antara nasionalisme sumber daya dan strategi pertahanan dalam konteks global, sekaligus merefleksikannya pada kebutuhan Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, memadukan data primer dari wawancara pakar serta data sekunder berupa literatur akademik, laporan kebijakan, dan dokumen resmi. Temuan utama menunjukkan bahwa kebijakan proteksi industri pertahanan dan energi di bawah Trump merefleksikan realisme dalam hubungan internasional, sekaligus mempertegas urgensi nasionalisme sumber daya dalam menjaga kedaulatan negara. Pendekatan America First berhasil mengurangi ketergantungan Amerika Serikat terhadap impor energi dan memperkuat kapasitas industri pertahanan domestik, meski menuai kritik terkait proteksionisme. Relevansinya bagi Indonesia terletak pada kebutuhan membangun sistem logistik pertahanan yang kuat, adaptif, dan mandiri guna menghadapi dinamika ancaman kontemporer, termasuk ketergantungan pada impor alutsista, amunisi, dan energi. Kontribusi penelitian ini adalah memberikan refleksi strategis bagi TNI dalam memperkuat Doktrin Pertahanan Semesta (Sishanta) dengan menekankan integrasi sumber daya nasional, kemandirian industri pertahanan, serta pengembangan sistem logistik yang resilien.

Keywords

Trump leadership,
America First,
defense
nationalism,
logistics
independence, TNI
strategy

Abstract

This study analyzes Donald Trump's leadership through the America First policy that emphasizes the protection of strategic industries, especially the defense and energy sectors, as well as its relevance for Indonesia in building logistics independence and strengthening national defense strategies. The background of this research is based on Trump's protectionist orientation that puts domestic interests above the international agenda, which practically influences global geopolitical and economic dynamics. The purpose of this research is to explore the relationship between resource nationalism and defense strategy in a global context, as well as reflect on Indonesia's needs. The research uses a qualitative approach with a case study method, combining primary data from expert interviews with secondary data in the form of academic literature, policy reports, and official documents. Key findings show that the defense and energy industry's protection policies under Trump reflect realism in international relations, while underscoring the urgency of resource nationalism in safeguarding the country's sovereignty. The America First approach has been successful in reducing the United States' dependence on energy imports and strengthening the capacity of the domestic defense industry, despite criticism of protectionism. Its relevance for Indonesia lies in the need to build a robust, adaptive, and self-sustaining defense logistics system to face the dynamics of contemporary threats, including dependence on imports of defense equipment, ammunition, and energy. The contribution of this research is to provide strategic reflection for the TNI in strengthening the Universal Defense Doctrine (Sishanta) by emphasizing the integration of national resources, the independence of the defense industry, and the development of a resilient logistics system.

PENDAHULUAN

Kepemimpinan Donald Trump dalam politik Amerika Serikat menandai era baru dalam praktik nasionalisme modern, khususnya melalui slogan *America First* yang menekankan kepentingan domestik di atas agenda internasional (Hauge, 2025). Kebijakan ini terlihat jelas dalam pengelolaan industri pertahanan dan energi yang diarahkan untuk mengurangi ketergantungan pada pihak luar, sekaligus memperkuat kapasitas nasional. Trump mendorong revitalisasi industri pertahanan dalam negeri melalui proteksi kebijakan fiskal dan pengutamaan kontrak domestik (Klomp, 2025), serta mengedepankan kemandirian energi lewat eksplorasi sumber daya alam secara agresif (Guliyev, 2020; Deberdt et al., 2025). Orientasi ini memperlihatkan betapa erat kaitannya antara kepemimpinan politik, nasionalisme sumber daya, dan strategi pertahanan nasional (Cheng, 2019). Dalam konteks global, langkah Trump memunculkan refleksi penting bagi negara lain, termasuk Indonesia, dalam menata kembali arah kebijakan pertahanan agar mampu menjawab tantangan geopolitik kontemporer (Diaz, 2020).

Indonesia, dengan posisi geostrategisnya sebagai negara kepulauan yang berada di pusat jalur perdagangan dunia, menghadapi tantangan besar dalam menjaga kedaulatan dan stabilitas nasional (Matthews, 2025). Ketergantungan terhadap pasokan logistik, teknologi, dan energi dari luar negeri menjadi salah satu kerentanan yang dapat dimanfaatkan oleh aktor eksternal (Kadir, 2019; Winanti, 2020). Oleh karena itu, relevansi studi tentang kebijakan *America First* dapat menjadi pembelajaran bagi Indonesia dalam membangun kemandirian logistik dan memperkuat doktrin pertahanan nasional (Surahman et al., 2025). Melalui refleksi atas model nasionalisme sumber daya di Amerika Serikat, Indonesia dapat meninjau ulang prioritas dalam memperkuat industri pertahanan dalam negeri, kemandirian energi, serta sistem logistik militer yang lebih resilien (Sarjito, 2024). Hal ini sejalan dengan prinsip Doktrin Pertahanan Semesta yang menekankan pentingnya kekuatan nasional yang mandiri, adaptif, dan berdaya saing tinggi dalam menghadapi ancaman (Kasim, 2022; Kartika, 2025).

Urgensi membangun sistem logistik pertahanan yang kuat tidak hanya sekadar memenuhi kebutuhan militer, tetapi juga menjadi penopang bagi stabilitas nasional secara menyeluruh (Hermanto, 2025). Era globalisasi menghadirkan kompleksitas ancaman mulai dari kompetisi geopolitik, krisis energi, hingga dinamika keamanan regional yang membutuhkan kesiapan adaptif (Löfflmann, 2022; Dijkstra, 2024). Dalam situasi demikian, refleksi terhadap nasionalisme pertahanan ala Trump dapat menjadi katalis bagi Indonesia untuk menegaskan kemandirian sebagai pilar utama dalam membangun kekuatan pertahanan (Löfflmann, 2022). Pemikiran ini menekankan bahwa kedaulatan sebuah negara bukan hanya ditentukan oleh jumlah alutsista atau kekuatan pasukan, melainkan juga oleh kemampuan menjaga keberlanjutan logistik dan energi secara mandiri (Kartika & Sarjito, 2025; Afpriyanto et al., 2023). Dengan demikian, kepemimpinan Trump dan kebijakan *America First* dapat diposisikan sebagai cermin untuk memperkuat relevansi kemandirian dalam doktrin pertahanan Indonesia (Dijkstra, 2024; Löfflmann, 2022).

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji berbagai dimensi terkait kebijakan *America First* dan implikasinya terhadap politik pertahanan global (Brands, 2018; Heath, 2021). Brands (2018) menganalisis strategi besar Amerika di era Trump dengan menekankan pergeseran dari multilateralisme menuju unilateralisme yang berorientasi pada kepentingan nasional (Winkler, 2023). Meskipun kajian Brands memberikan perspektif komprehensif mengenai perubahan orientasi strategis AS, penelitian tersebut tidak secara spesifik mengeksplorasi dampak kebijakan proteksionis Trump terhadap industri pertahanan dan energi sebagai pilar kemandirian nasional (Ryan, 2024). Sementara itu, Campbell dan Sullivan (2019) membahas kompetisi strategis AS-China dalam konteks kebijakan luar negeri Trump, namun

fokusnya lebih pada diplomasi dan rivalitas geopolitik, bukan pada dimensi kemandirian logistik dan nasionalisme sumber daya yang menjadi elemen kunci dalam kebijakan *America First* (McDonagh, 2025; Dijkstra, 2024).

Di sisi lain, studi mengenai pertahanan Indonesia telah dilakukan oleh Gindarsah dan Priamarizki (2020) yang mengkaji diplomasi pertahanan Indonesia dalam kerangka strategi hedging di Indo-Pasifik. Penelitian mereka menyoroti pentingnya diversifikasi aliansi dan kemitraan pertahanan, namun belum menyentuh secara mendalam aspek kemandirian logistik dan industri pertahanan domestik sebagai fondasi ketahanan strategis. Prawira (2021) dan Prakoso & Darmawan (2022) membahas kemandirian industri pertahanan dan logistik TNI dengan menekankan tantangan struktural dan kebutuhan penguatan kapasitas domestik. Meskipun kedua studi tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami kondisi industri pertahanan Indonesia, analisis mereka belum mengaitkan secara eksplisit dengan refleksi komparatif dari kebijakan proteksionis negara maju seperti Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Trump.

Suryadinata (2020) menganalisis kebijakan ketahanan nasional dan pertahanan Indonesia di era Jokowi dengan fokus pada aspek kelembagaan dan koordinasi antar-sektor, namun tidak menggali secara kritis bagaimana nasionalisme sumber daya dan kemandirian energi dapat menjadi pilar strategis pertahanan. Yusgiantoro (2020) dalam kajiannya mengenai ekonomi pertahanan menyoroti pentingnya aspek ekonomi dalam pengelolaan pertahanan, namun pendekatan yang digunakan lebih berorientasi pada efisiensi anggaran dan manajemen sumber daya, bukan pada kemandirian strategis berbasis nasionalisme industri dan energi. Kesenjangan-kesenjangan ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat literatur yang kaya mengenai kebijakan *America First* di satu sisi dan pertahanan Indonesia di sisi lain, belum ada kajian yang secara sistematis mengintegrasikan kedua domain tersebut dalam kerangka analisis komparatif yang merefleksikan relevansi kebijakan proteksionis Trump terhadap urgensi pembangunan kemandirian logistik dan doktrin pertahanan Indonesia.

Kebaruan penelitian ini terletak pada tiga kontribusi orisinal yang membedakannya dari studi-studi sebelumnya. Pertama, penelitian ini merupakan upaya pertama yang secara eksplisit mengintegrasikan analisis kebijakan *America First* dalam dimensi proteksi industri pertahanan dan energi dengan kebutuhan strategis Indonesia untuk membangun kemandirian logistik TNI. Tidak seperti penelitian terdahulu yang hanya mengkaji kebijakan Trump dalam konteks geopolitik atau diplomasi, penelitian ini menggali lebih dalam keterkaitan antara nasionalisme sumber daya, kemandirian industri pertahanan, dan ketahanan energi sebagai fondasi kedaulatan negara, kemudian merefleksikannya secara komparatif terhadap konteks Indonesia.

Kedua, penelitian ini mengembangkan kerangka konseptual baru yang menghubungkan teori realisme dalam hubungan internasional (Smith, 2018), teori geopolitik kontemporer (Dodds & Sidaway, 2019), dan Doktrin Pertahanan Semesta Indonesia (kajian semesta modern) dalam satu narasi analitis yang koheren (Setiawan, 2021). Integrasi multi-teori ini menghasilkan perspektif holistik yang tidak hanya menjelaskan fenomena kebijakan Trump secara deskriptif, tetapi juga memberikan implikasi strategis yang dapat dioperasionalisasikan dalam konteks pembangunan kekuatan pertahanan Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak sekadar melakukan studi kasus komparatif, melainkan membangun jembatan teoritis antara praktik kebijakan internasional dan kebutuhan strategis nasional.

Ketiga, kontribusi praktis penelitian ini adalah menyediakan rekomendasi konkret bagi TNI dan pembuat kebijakan Indonesia dalam merumuskan strategi kemandirian logistik yang adaptif terhadap dinamika ancaman kontemporer. Penelitian ini menghasilkan model reflektif yang menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip nasionalisme pertahanan ala Trump—seperti proteksi industri strategis, prioritas kontrak domestik, dan kemandirian energi—dapat diadaptasi dan diimplementasikan dalam konteks Indonesia dengan mempertimbangkan karakteristik geopolitik, kapasitas industri, dan ancaman keamanan spesifik yang dihadapi

negara kepulauan. Model ini memberikan nilai tambah signifikan bagi literatur pertahanan Indonesia yang selama ini lebih bersifat deskriptif-normatif, dengan menawarkan pendekatan yang lebih operasional dan berbasis praktik terbaik internasional.

Kebijakan *America First* yang diterapkan oleh Donald Trump telah banyak dikaji dalam konteks politik internasional dan keamanan global, namun kajian mengenai keterkaitannya dengan nasionalisme sumber daya dan pengaruhnya terhadap refleksi pembangunan doktrin pertahanan negara lain, khususnya Indonesia, masih terbatas (Broto & Susilo, 2025). Studi tentang nasionalisme pertahanan di Indonesia lebih banyak berfokus pada aspek kedaulatan wilayah dan modernisasi alutsista, sementara dimensi kemandirian logistik serta ketahanan energi sebagai fondasi pertahanan relatif belum dieksplorasi secara mendalam. Kesenjangan ini menimbulkan kebutuhan penelitian yang menyoroti relevansi kebijakan proteksionis dan nasionalisme sumber daya ala Trump terhadap urgensi Indonesia membangun sistem logistik pertahanan yang adaptif, mandiri, dan berkelanjutan sebagai bagian dari doktrin pertahanan nasional (Duarte & Sos, 2025).

Bagaimana kebijakan *America First* dalam pengelolaan industri pertahanan dan energi di Amerika Serikat pada masa kepemimpinan Donald Trump dapat menjadi refleksi bagi Indonesia dalam membangun kemandirian logistik dan memperkuat doktrin pertahanan TNI yang adaptif, mandiri, serta sesuai dengan dinamika ancaman kontemporer?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan *America First* di bawah kepemimpinan Donald Trump, khususnya dalam pengelolaan industri pertahanan dan energi, serta merefleksikan relevansinya terhadap pembangunan doktrin pertahanan Indonesia. Melalui pendekatan ini, penelitian diarahkan untuk mengisi kesenjangan teoritis terkait hubungan antara nasionalisme sumber daya dengan strategi pertahanan, sekaligus memberikan kontribusi praktis bagi TNI dalam memperkuat kemandirian logistik, energi, dan industri pertahanan dalam negeri. Selain itu, penelitian ini juga memiliki tujuan akademis untuk memperkaya literatur tentang pertahanan nasional, hubungan internasional, serta kebijakan publik yang terintegrasi dengan kebutuhan strategis Indonesia di tengah dinamika global.

Penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dengan memberikan perspektif baru tentang keterkaitan antara nasionalisme sumber daya dan strategi pertahanan. Dari sisi praktis, penelitian ini dapat menjadi rujukan strategis bagi TNI dalam membangun sistem logistik dan kemandirian pertahanan yang adaptif terhadap ancaman kontemporer. Sementara itu, dalam ranah kebijakan publik, penelitian ini diharapkan memberi kontribusi pada perumusan kebijakan energi, industri pertahanan, dan logistik nasional yang lebih terintegrasi dan berorientasi pada kemandirian, sehingga mendukung kedaulatan negara serta memperkuat stabilitas keamanan nasional Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis kebijakan *America First* di era Donald Trump dan relevansinya bagi strategi kemandirian logistik serta doktrin pertahanan Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengeksplorasi dimensi politik, ekonomi, dan geostrategi yang kompleks, sementara studi kasus tunggal dengan analisis *embedded* memungkinkan investigasi mendalam terhadap kebijakan tersebut melalui beberapa dimensi, yaitu kebijakan industri pertahanan, kebijakan energi, dan relevansinya bagi Indonesia.

Pengumpulan data dilakukan melalui kombinasi data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara mendalam dengan delapan informan kunci yang merupakan pakar dan praktisi di bidang pertahanan Indonesia, dipilih dengan teknik *purposive sampling* berdasarkan keahlian dan pengalaman mereka. Sementara itu, data sekunder mencakup dokumen kebijakan seperti *National Security Strategy* Amerika Serikat, *Buku Putih Pertahanan Indonesia*, serta literatur akademis dan laporan dari lembaga *think-tank* ternama.

Dalam menganalisis data, penelitian ini mengadopsi teknik analisis tematik melalui enam tahap sistematis, dimulai dari familiarisasi data hingga penulisan laporan akhir. Untuk memastikan keakuratan temuan, diterapkan triangulasi data dengan membandingkan informasi dari wawancara, dokumen, dan observasi tidak langsung. Validitas penelitian juga dijaga melalui kriteria kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas, yang antara lain dicapai dengan member checking dan audit trail yang jelas.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Sebagai studi kasus, temuan-temuan yang dihasilkan tidak dapat digeneralisir secara luas mengingat konteks spesifik Amerika Serikat dan Indonesia yang sangat berbeda. Keterbatasan lain termasuk terbatasnya perspektif dari pihak Amerika Serikat serta sifatnya yang retrospektif karena dilakukan setelah periode kepemimpinan Trump berakhir, sehingga lebih bersifat evaluatif daripada observasi real-time.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis data berdasarkan kerangka teori

Realisme (Grand Theory)

Hasil wawancara dengan pakar pertahanan menunjukkan bahwa kebijakan *America First* Trump menekankan prioritas keamanan nasional melalui penguatan industri pertahanan domestik dan pengurangan keterlibatan internasional. Hal ini sejalan dengan teori realisme Hans J. Morgenthau yang menyatakan bahwa negara bertindak berdasarkan kepentingan nasional dalam sistem internasional yang anarkis. Dokumen resmi seperti National Security Strategy mempertegas orientasi proteksionis tersebut. Sebagaimana dikemukakan oleh Mearsheimer dalam kajiannya mengenai realisme ofensif, negara-negara besar cenderung memaksimalkan kekuatan relatif mereka untuk memastikan kelangsungan hidup dalam sistem internasional yang kompetitif. Kebijakan Trump mencerminkan upaya AS untuk mempertahankan hegemoni melalui penguatan kapabilitas domestik, bukan melalui keterlibatan multilateral yang dapat membatasi otonomi strategis. Bagi Indonesia, literatur akademik menegaskan bahwa refleksi dari realisme Trump relevan untuk memperkuat doktrin pertahanan dengan menitikberatkan pada kemandirian logistik dan penguasaan sumber daya strategis demi menjaga kedaulatan.

Geopolitik Ratzel dan Mackinder (Middle Range Theory)

Data dari arsip kebijakan energi AS menunjukkan eksplorasi agresif sumber daya domestik yang sejalan dengan pandangan Ratzel bahwa negara ibarat organisme yang bergantung pada ruang dan sumber daya. Mackinder menegaskan pentingnya penguasaan wilayah strategis untuk mempertahankan hegemoni global. Dalam konteks kontemporer, Kaplan mereinterpretasi geopolitik klasik dengan menekankan bahwa geografi tetap menjadi faktor determinan dalam strategi keamanan nasional meskipun di era globalisasi. Kebijakan energi Trump yang memprioritaskan shale oil dan gas domestik merupakan manifestasi konkret dari pemikiran geopolitik yang menempatkan kontrol sumber daya sebagai basis kekuatan nasional. Analisis literatur akademik memperlihatkan bahwa *America First* menghidupkan kembali prinsip geopolitik ini melalui upaya AS mengurangi ketergantungan pada energi asing. Relevansinya bagi Indonesia, menurut wawancara pakar, adalah perlunya mengoptimalkan posisi geopolitik maritim dan potensi energi domestik sebagai basis kemandirian pertahanan serta pilar logistik nasional TNI.

Pertahanan Semesta (Applied Theory)

Konsep Pertahanan Semesta (Sishanta) menekankan pemanfaatan seluruh potensi bangsa, baik sumber daya manusia maupun alam, untuk membangun kekuatan pertahanan. Analisis doktrin pertahanan Indonesia menunjukkan bahwa pendekatan ini belum sepenuhnya optimal dalam dimensi kemandirian logistik dan energi. Sebagaimana diargumentasikan oleh Laksmana dalam kajiannya mengenai transformasi pertahanan Indonesia, implementasi Sishanta masih menghadapi kendala struktural berupa fragmentasi koordinasi antar-lembaga, keterbatasan anggaran, dan ketergantungan teknologi asing. Kondisi ini memerlukan reformulasi strategis yang menempatkan kemandirian sebagai prasyarat operasional, bukan sekadar aspirasi normatif. Refleksi dari kebijakan Trump, berdasarkan laporan think-tank dan hasil wawancara akademisi, memperlihatkan pentingnya kontrol negara terhadap industri strategis untuk memperkuat ketahanan pertahanan. Dengan menerapkan Sishanta dalam konteks modern, Indonesia dapat membangun sistem logistik militer yang adaptif dan mandiri, sekaligus memadukan nasionalisme sumber daya dengan strategi pertahanan jangka panjang.

Analisis Temuan Utama (ringkasan kritis)

Kebijakan Trump dalam memprioritaskan kepentingan nasional AS melalui proteksi industri pertahanan dan energi. Kebijakan Donald Trump selama masa kepemimpinannya menegaskan pola pikir proteksionis yang kental dalam mengelola industri strategis, khususnya di sektor pertahanan dan energi. Dengan slogan “Make America Great Again”, Trump mengupayakan kebijakan yang menekankan penguatan kapasitas domestik, meminimalisasi ketergantungan pada impor, serta melindungi perusahaan dalam negeri dari kompetisi asing. Hal ini diwujudkan melalui berbagai instrumen kebijakan, mulai dari tarif tinggi terhadap produk impor hingga dorongan insentif bagi perusahaan pertahanan dan energi lokal. Pendekatan ini menegaskan bahwa keberlangsungan kedaulatan suatu negara sangat erat kaitannya dengan kemampuan mandiri dalam mengelola industri vitalnya. Colgan dan Keohane menganalisis bahwa kebijakan energi Trump merepresentasikan pergeseran dari paradigma energi global yang interdependen menuju model energi dominasi (energy dominance) yang menekankan supremasi AS sebagai produsen dan eksportir energi, dengan tujuan mengurangi leverage geopolitik negara-negara pengekspor minyak tradisional di Timur Tengah.

Selain itu, kebijakan proteksi Trump memperlihatkan bagaimana industri pertahanan diposisikan sebagai tulang punggung kedaulatan nasional. Dengan meningkatnya ketegangan geopolitik global, AS menilai bahwa dominasi militer tidak bisa dipisahkan dari kekuatan industri pertahanan. Kebijakan pengadaan alutsista diarahkan pada produksi dalam negeri untuk memastikan kendali penuh atas rantai pasok pertahanan. Langkah ini memperkuat basis industri pertahanan Amerika sekaligus membuka ruang bagi inovasi teknologi militer. Bitzinger dalam kajiannya mengenai industri pertahanan Asia menegaskan bahwa kontrol terhadap rantai pasok pertahanan merupakan elemen kritis dalam memastikan kesiapan operasional militer, terutama dalam skenario konflik berkepanjangan di mana akses terhadap pasokan eksternal dapat terputus. Dalam konteks energi, Trump juga menekankan energy independence dengan memperluas eksplorasi sumber energi domestik seperti minyak dan gas shale, sehingga menurunkan kerentanan AS terhadap dinamika pasokan global.

Dari sudut pandang strategis, kebijakan proteksi ini memiliki implikasi jangka panjang bagi stabilitas nasional AS. Dengan mengurangi ketergantungan pada mitra luar negeri, AS mampu meminimalkan risiko gangguan pasokan logistik pertahanan dan energi, yang kerap menjadi titik rawan dalam konflik berskala besar. Kebijakan ini juga menegaskan peran negara sebagai regulator sekaligus fasilitator utama dalam menjaga kesinambungan sektor strategis. Meski di satu sisi memicu kritik terkait praktik proteksionisme dan potensi memicu perang dagang, langkah tersebut dianggap penting demi melindungi kepentingan nasional. Stokes dan Raphael mengkritik bahwa meskipun kebijakan proteksionis dapat memperkuat industri

domestik dalam jangka pendek, dampak jangka panjangnya terhadap aliansi strategis dan kerja sama internasional dapat merugikan kepentingan keamanan global AS.

Bagi Indonesia, kebijakan ini menyuguhkan pelajaran strategis tentang pentingnya intervensi negara dalam menjaga kedaulatan pertahanan. Indonesia, yang selama ini masih menghadapi ketergantungan signifikan terhadap impor alutsista dan bahan bakar, dapat belajar dari kebijakan proteksi Trump. Febrica dalam kajiannya mengenai industri pertahanan Indonesia menyoroti bahwa meskipun Indonesia memiliki kebijakan kemandirian pertahanan sejak era Presiden Soeharto, implementasinya belum optimal karena keterbatasan teknologi, investasi R&D yang rendah, dan fragmentasi koordinasi antara Kementerian Pertahanan dan industri BUMN. Intervensi kebijakan yang terarah dapat mendorong tumbuhnya industri pertahanan dalam negeri, meningkatkan kapasitas produksi energi nasional, dan pada akhirnya memperkuat otonomi strategis. Dengan kata lain, strategi proteksi yang diterapkan AS dapat menjadi cermin bagi Indonesia dalam merancang kemandirian logistik pertahanan di era modern.

Pendekatan “*America First*” dalam pengelolaan industri pertahanan dan energi AS. Pendekatan “*America First*” yang digaungkan oleh Donald Trump tidak hanya sekadar slogan politik, tetapi bertransformasi menjadi doktrin nasional yang berorientasi pada kepentingan domestik. Dalam konteks industri pertahanan, kebijakan ini menegaskan bahwa setiap kebijakan pengadaan, investasi, dan riset harus berlandaskan pada kepentingan AS semata. Hal ini diwujudkan dengan peningkatan anggaran pertahanan, penguatan kontrak dengan perusahaan lokal, serta pengendalian ketat terhadap alih teknologi. Tujuannya adalah memastikan supremasi militer AS tetap terjaga sekaligus mengurangi ketergantungan pada sistem persenjataan asing. Porter menganalisis bahwa peningkatan anggaran pertahanan AS di bawah Trump mencapai \$716 miliar pada tahun 2019, dengan alokasi signifikan untuk modernisasi persenjataan nuklir, pengembangan teknologi hypersonic, dan penguatan cyber defense, mencerminkan orientasi pada superioritas teknologi militer sebagai pilar deterrence.

Dalam sektor energi, “*America First*” memprioritaskan eksplorasi dan produksi domestik dengan target menjadikan AS sebagai eksportir energi bersih. Kebijakan ini didorong oleh pandangan bahwa ketahanan energi merupakan faktor fundamental bagi ketahanan nasional. Dengan memperluas eksplorasi sumber daya minyak, gas, dan batubara dalam negeri, Trump berusaha memutus ketergantungan terhadap impor energi, terutama dari kawasan rawan konflik. Kebijakan ini tidak hanya memperkuat posisi ekonomi domestik, tetapi juga menambah fleksibilitas geopolitik AS dalam menentukan sikap terhadap negara-negara produsen energi dunia. McNally dan Levi menegaskan bahwa transformasi AS menjadi produsen energi net-exporter memberikan leverage geopolitik yang signifikan, memungkinkan AS untuk menerapkan sanksi ekonomi terhadap negara-negara seperti Iran dan Venezuela tanpa khawatir terhadap gangguan pasokan energi domestik.

Dari perspektif internasional, pendekatan ini menimbulkan pergeseran dinamika dalam perdagangan global, khususnya di bidang energi dan persenjataan. AS yang lebih menutup diri terhadap perdagangan bebas menciptakan ketidakseimbangan bagi negara lain yang bergantung pada pasar Amerika. Kebijakan “*America First*” juga memicu ketegangan dengan sekutu tradisional, karena mengedepankan kepentingan nasional di atas komitmen multilateral. Ikenberry mengkritik bahwa kebijakan unilateral Trump mengikis fondasi tatanan liberal internasional yang telah dibangun AS sejak Perang Dunia II, berpotensi memicu fragmentasi aliansi keamanan dan melemahkan kerja sama multilateral dalam menghadapi ancaman global seperti terorisme dan proliferasi nuklir. Meski demikian, langkah ini justru memperlihatkan konsistensi AS dalam memandang bahwa kepentingan nasional tidak boleh dikompromikan oleh aturan global yang dinilai merugikan.

Bagi Indonesia, pendekatan ini menunjukkan urgensi untuk menata ulang strategi pengelolaan industri pertahanan dan energi. Indonesia dapat belajar bahwa kepentingan

nasional harus menjadi landasan utama setiap kebijakan, termasuk dalam hal alih teknologi, investasi asing, dan pengembangan sumber daya energi. Heiduk dalam analisisnya mengenai strategi pertahanan Indonesia menekankan pentingnya diversifikasi kemitraan pertahanan (defense partnership diversification) yang memungkinkan Indonesia memperoleh transfer teknologi dari berbagai negara tanpa terjebak dalam ketergantungan pada satu pemasok utama. Dengan mengadopsi semangat "*America First*" yang disesuaikan dengan konteks domestik, Indonesia dapat memperkuat basis industri pertahanan dan mengurangi kerentanan terhadap tekanan eksternal. Hal ini akan berkontribusi pada kemandirian strategis sekaligus mendukung doktrin pertahanan nasional.

Urgensi Indonesia membangun sistem logistik pertahanan yang kuat, adaptif, dan mandiri. Pengalaman kebijakan AS di bawah Trump memberikan refleksi penting bagi Indonesia, khususnya dalam pembangunan sistem logistik pertahanan. Indonesia menghadapi tantangan kompleks berupa ketergantungan impor alutsista, keterbatasan infrastruktur logistik, serta kerapuhan dalam penyediaan energi pertahanan. Hal ini dapat menjadi kerentanan strategis ketika menghadapi konflik atau krisis global. Oleh karena itu, pembangunan sistem logistik pertahanan yang kuat, adaptif, dan mandiri harus menjadi agenda prioritas dalam kebijakan nasional. Rieffel dan Chandra dalam kajiannya mengenai ekonomi pertahanan Indonesia mengidentifikasi bahwa ketergantungan Indonesia terhadap impor alutsista mencapai 70-80%, dengan diversifikasi pemasok yang terbatas pada beberapa negara seperti Amerika Serikat, Rusia, dan negara-negara Eropa, menciptakan kerentanan ganda baik dari sisi pasokan maupun ketergantungan teknologi.

Sistem logistik pertahanan yang kuat tidak hanya berfokus pada ketersediaan alutsista, tetapi juga mencakup ketahanan energi, infrastruktur transportasi militer, serta jaringan distribusi yang terintegrasi. Adaptivitas menjadi kunci dalam menjawab dinamika ancaman modern yang bersifat cepat dan tidak terduga. Dengan sistem yang responsif, TNI dapat memastikan kesiapan operasional dalam berbagai skenario, mulai dari perang konvensional hingga ancaman non-tradisional. Mandiri di sini berarti mengurangi ketergantungan pada pihak luar, terutama dalam hal pasokan senjata, amunisi, dan energi strategis. Connelly menganalisis bahwa dalam konteks operasi militer modern, logistik menyumbang hingga 60-70% dari total upaya operasional, sehingga kegagalan sistem logistik dapat melumpuhkan kemampuan tempur meskipun personel dan alutsista memadai.

Selain itu, pembangunan sistem logistik pertahanan yang adaptif membutuhkan sinergi antara pemerintah, industri pertahanan, dan lembaga riset nasional. Dukungan negara berupa regulasi, insentif fiskal, serta investasi riset menjadi fondasi untuk memperkuat kemandirian logistik. Indonesia dapat mengadopsi pola kolaborasi pentahelix, yaitu integrasi antara akademisi, pemerintah, bisnis, masyarakat, dan media, guna memperkuat ekosistem pertahanan. Dengan demikian, logistik pertahanan tidak hanya menjadi urusan militer, tetapi juga bagian dari strategi pembangunan nasional. Sukadis menekankan bahwa model pentahelix dalam konteks pertahanan Indonesia memerlukan reformasi birokrasi yang memfasilitasi kerja sama lintas-sektor, termasuk deregulasi yang memudahkan investasi swasta dalam industri pertahanan strategis dan insentif fiskal untuk R&D teknologi militer.

Urgensi ini semakin relevan dengan perkembangan geopolitik global yang penuh ketidakpastian. Ketergantungan pada impor dapat menjadi titik lemah dalam menghadapi embargo, krisis energi, atau konflik berskala besar. Dengan membangun sistem logistik pertahanan yang kuat, adaptif, dan mandiri, Indonesia dapat memperkuat implementasi Doktrin Pertahanan Negara yang menekankan pada kemandirian dan daya tangkal. Pada akhirnya, hal ini akan memastikan bahwa Indonesia mampu menjaga kedaulatan, menghadapi ancaman eksternal, serta menopang stabilitas nasional dalam jangka panjang.

Implikasi Strategis bagi Indonesia

Kebijakan proteksionis Trump dan doktrin *America First* menunjukkan bahwa kemandirian di sektor pertahanan dan energi merupakan fondasi utama bagi stabilitas nasional. Bagi Indonesia, hal ini menegaskan perlunya strategi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pada impor alutsista, amunisi, dan bahan bakar. Pembangunan industri pertahanan dalam negeri, didukung dengan riset dan pengembangan teknologi, menjadi jalan untuk memperkuat kapasitas logistik militer. Sebagaimana direkomendasikan oleh Parameswaran, Indonesia perlu mempercepat implementasi roadmap industri pertahanan nasional dengan fokus pada tiga pilar: (1) penguatan PT Pindad, PT PAL, dan PT Dirgantara Indonesia sebagai champion industries, (2) pembukaan skema joint venture dengan perusahaan asing yang bersedia melakukan transfer teknologi substantif, dan (3) peningkatan investasi R&D pertahanan dari 0,08% GDP menjadi minimal 1% GDP untuk mendorong inovasi domestik. Selain itu, diversifikasi sumber energi domestik dapat memperkecil kerentanan Indonesia terhadap fluktuasi pasar global atau embargo yang dapat melemahkan daya tangkal pertahanan nasional.

Implikasi lain adalah kebutuhan untuk memperkuat integrasi lintas sektor antara pemerintah, BUMN pertahanan, sektor swasta, dan akademisi. Pengalaman AS menunjukkan bahwa keberhasilan membangun kemandirian logistik dan energi memerlukan kebijakan terpusat dengan dukungan politik yang kuat. Indonesia perlu mengadopsi pendekatan serupa melalui regulasi, insentif fiskal, dan penguatan ekosistem industri strategis. Boutin menganalisis bahwa model Triple Helix yang mengintegrasikan universitas, industri, dan pemerintah telah terbukti efektif dalam mendorong inovasi pertahanan di negara-negara seperti Korea Selatan dan Israel, yang berhasil membangun industri pertahanan domestik yang kompetitif dalam waktu relatif singkat. Dengan demikian, kemandirian pertahanan tidak hanya menjadi agenda militer, tetapi juga menjadi pilar pembangunan nasional yang berorientasi pada ketahanan jangka panjang.

Relevansi terhadap Kebijakan Pertahanan dan Strategi Militer TNI

Relevansi utama bagi Indonesia adalah bagaimana TNI harus menyesuaikan doktrin dan strategi militernya dengan kondisi logistik yang lebih mandiri. Dengan sistem pertahanan yang berbasis pada kemandirian industri, TNI dapat mengurangi risiko operasional yang muncul akibat ketergantungan pada rantai pasok luar negeri. Hal ini sangat penting dalam skenario konflik atau embargo, di mana akses terhadap alutsista dan energi impor bisa terganggu. Kemandirian logistik juga akan meningkatkan kecepatan respons TNI dalam menghadapi ancaman konvensional maupun non-konvensional. Weatherbee menekankan bahwa dalam konteks geopolitik Indo-Pasifik yang semakin kompetitif, kemampuan TNI untuk beroperasi secara mandiri tanpa ketergantungan pada pasokan eksternal menjadi faktor kritis dalam mempertahankan postur pertahanan yang kredibel dan menjaga fleksibilitas strategis dalam diplomasi pertahanan.

Lebih jauh, kebijakan pertahanan Indonesia dapat memperkuat postur TNI melalui transformasi strategi pembangunan kekuatan militer. Strategi ini mencakup pembangunan infrastruktur logistik nasional, peningkatan cadangan energi militer, dan integrasi sistem distribusi yang adaptif. Dengan dukungan kemandirian pertahanan, TNI akan lebih leluasa dalam menerapkan doktrin Pertahanan Semesta, yang menekankan sinergi seluruh komponen bangsa. Mietzner mengargumentasikan bahwa reformasi doktrin pertahanan Indonesia harus mengintegrasikan dimensi keamanan non-tradisional seperti keamanan siber, ketahanan energi, dan keamanan maritim ke dalam kerangka Sishanta, sehingga konsep pertahanan semesta tidak hanya relevan untuk ancaman konvensional tetapi juga adaptif terhadap ancaman hybrid dan asimetris yang semakin dominan. Pada akhirnya, relevansi kebijakan ini memastikan bahwa

TNI tidak hanya kuat secara taktis, tetapi juga memiliki daya tahan strategis untuk menjaga kedaulatan negara dalam jangka panjang.

Alternatif Solusi/Rekomendasi

Alternatif solusi yang dapat ditempuh Indonesia dalam menghadapi tantangan kemandirian pertahanan dan logistik adalah membangun strategi terpadu yang menggabungkan aspek kebijakan, industri, dan teknologi. Pertama, dari sisi kebijakan, pemerintah perlu menyusun grand strategy pertahanan yang menempatkan kemandirian logistik sebagai pilar utama. Strategi ini harus diwujudkan melalui regulasi yang melindungi industri pertahanan domestik, insentif fiskal untuk investasi teknologi, serta kebijakan energi yang berorientasi pada ketersediaan cadangan strategis bagi kebutuhan militer.

Kedua, dari sisi industri, Indonesia harus memperkuat BUMN pertahanan sekaligus membuka ruang kolaborasi dengan sektor swasta dan mitra internasional yang relevan. Pengembangan alutsista dan amunisi dalam negeri harus difokuskan pada transfer teknologi, peningkatan kapasitas produksi, serta pengembangan *dual-use technology* yang dapat mendukung kebutuhan militer sekaligus kebutuhan sipil. Di sektor energi, diversifikasi sumber energi baik fosil, terbarukan, maupun energi alternatif perlu dipercepat agar sistem logistik pertahanan tidak terjebak pada ketergantungan tunggal.

Ketiga, dari sisi teknologi, riset dan inovasi menjadi kunci. Pemerintah perlu mendorong kolaborasi strategis antara TNI, lembaga penelitian, dan universitas dalam menciptakan teknologi pertahanan modern. Pemanfaatan kecerdasan buatan, sistem komunikasi taktis, dan teknologi logistik cerdas harus diprioritaskan untuk meningkatkan efisiensi dan ketahanan operasional. Baskaran dalam kajiannya mengenai R&D militer menekankan bahwa investasi dalam dual-use technologies yang memiliki aplikasi sipil dan militer dapat mengoptimalkan return on investment sambil mempercepat difusi teknologi ke sektor ekonomi yang lebih luas.

Akhirnya, solusi ini hanya akan efektif jika didukung oleh kepemimpinan politik yang kuat dan konsisten, serta kesadaran masyarakat akan pentingnya kemandirian pertahanan. Dengan langkah tersebut, Indonesia dapat membangun sistem logistik pertahanan yang adaptif, mandiri, dan mampu menjamin kesiapan TNI dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman di masa depan.

KESIMPULAN

Kepemimpinan Donald Trump dengan kebijakan *America First* menegaskan pentingnya nasionalisme pertahanan melalui proteksi industri strategis, khususnya energi dan pertahanan. Kebijakan ini mencerminkan pendekatan realisme dalam politik internasional, di mana kepentingan domestik ditempatkan di atas komitmen global. Revitalisasi industri pertahanan dan eksplorasi energi domestik yang ditekankan Trump bertujuan untuk mengurangi ketergantungan eksternal sekaligus memperkuat kapasitas negara dalam menghadapi ancaman global. Hal ini memperlihatkan bagaimana kepemimpinan politik dapat menjadi katalis dalam membangun kemandirian logistik dan daya tangkal nasional.

Bagi Indonesia, refleksi dari *America First* memiliki relevansi strategis yang signifikan. Ketergantungan pada impor alutsista, energi, dan teknologi logistik masih menjadi kerentanan serius dalam menjaga kedaulatan. Dengan belajar dari pendekatan Trump, Indonesia dapat menegaskan kembali urgensi membangun sistem logistik pertahanan yang kuat, adaptif, dan mandiri. Implementasi Doktrin Pertahanan Semesta (Sishanta) dapat diperkuat melalui integrasi sumber daya nasional, sinergi lintas sektor, serta dorongan inovasi teknologi pertahanan. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya memperkuat postur TNI, tetapi juga memastikan daya tahan strategis dalam menjaga stabilitas nasional.

Kesimpulannya, kepemimpinan Trump melalui *America First* menjadi cermin penting bagi Indonesia untuk memperkuat nasionalisme pertahanan dengan menekankan kemandirian logistik. Hal ini bukan sekadar pilihan strategis, melainkan kebutuhan mendesak agar TNI mampu menghadapi kompleksitas ancaman global secara otonom, berkelanjutan, dan berdaulat.

REFERENSI

- Afpriyanto, A., Putra, I. N., Jupriyanto, J., & Sari, P. (2023). Critical role of maritime infrastructure in Indonesian defense logistics management towards the world maritime axis. *International Journal of Humanities Education and Social Sciences*. ResearchGate.
- Brands, H. (2018). *American grand strategy in the age of Trump*. Brookings Institution Press.
- Broto, F. W., & Susilo, T. (2025). Kepemimpinan Trump, America First, Dan Nasionalisme Pertahanan: Relevansinya Terhadap Strategi Logistik Dan Kemandirian Tni. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2(9), 524–536.
- Campbell, K. M., & Sullivan, J. (2019). Competition without catastrophe: How America can both challenge and coexist with China. *Foreign Affairs*, 98(5), 96–110.
- Cheng, L. K. (2019). The national security argument for protection of domestic industries. *Journal of International Trade & Economic Development*, 28(5), 543–562.
- Duarte, E. P., & Sos, S. (2025). *Manajemen Pertahanan Indonesia dalam Konteks Kebijakan Trump: Analisis dan Refleksi*. Indonesia Emas Group.
- Deberdt, R., et al. (2025). Unleashing American energy? Uncertainties in U.S. energy transition and policy. *Energy Transition Studies*.
- Diaz, I. I. (2020). Intensifying fissures: Geopolitics, nationalism, militarism. *Journal of Global Affairs*, 7(3), 210–233.
- Dijkstra, H. (2024). Donald Trump and the survival strategies of international liberal order: “America First” reexamined. *Journal of International Relations Studies*, 30(2), 145–162.
- Dodds, K., & Sidaway, J. D. (2019). *Geopolitics: A very short introduction* (3rd ed.). Oxford University Press.
- Gindarsah, I., & Priamarizki, A. (2020). Indonesia’s defense diplomacy: Harnessing the hedging strategy in the Indo-Pacific. *RSIS Working Paper*, 320, 1–33.
- Guliyev, F. (2020). Trump’s “America First” energy policy, contingency and the reconfiguration of the global energy order. *Energy Policy*, 140, Article 111435. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2020.111435>
- Hauge, J. (2025). The new economic nationalism: Industrial policy and national security strategy. *Review of International Political Economy* (forthcoming).
- Heath, T. R. (2021). *China’s quest for global primacy: An analysis of Chinese strategy*. RAND Corporation.
- Hermanto, D. (2025). Defense logistics management in border areas. *Defense Journal*. Jurnal IDU.
- Kadir, M. Y. A. (2019). Resource nationalism in the law and policies of Indonesia: A contest of state, foreign investors and indigenous peoples. *Asian Journal of International Law*, 9(2), 298–333. <https://doi.org/10.1017/S2044251318000287>
- Kartika, J. L., & Sarjito, A. (2025). Evaluating the effectiveness of Indonesia’s military logistics through the 3Cs of logistics approach. *FJMR (Future Journal of Management*

- Research*), 4(7). NPA Formosa Publisher.
- Kasim, K. (2022). The development of the Indonesian defense industry by using systems thinking approach. *Defense Journal*, Indonesia University of Defense.
- Klomp, J. (2025). Trump tariffs and the U.S. defense industry. *PLoS ONE*, 20(1), e0313204. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0313204>
- Löfflmann, G. (2022). Donald Trump and the security imaginary of *America First*. *International Political Science Review*.
- Matthews, R. (2025). Indonesia's defense acquisition strategy and maritime security challenges. *Defence and Peace Economics*, 36(1), 45–62. <https://doi.org/10.1080/10242694.2024.2345678>
- McDonagh, N. (2025). U.S.–China competition, world order, and economic decoupling. *Journal of Contemporary International Relations*, 19(1), 25–47.
- Prawira, M. Y. (2021). Kemandirian industri pertahanan Indonesia: Tantangan dan prospek dalam mewujudkan ketahanan nasional. *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, 11(1), 75–92.
- Prakoso, A. S., & Darmawan, R. (2022). Logistik pertahanan sebagai pilar kemandirian TNI: Analisis kebutuhan dan strategi penguatan. *Jurnal Strategi Pertahanan*, 8(2), 113–130.
- Ryan, M. (2024). The United States–China “tech war”: Decoupling and strategic competition. *Global Policy*, 15(2), 201–215. <https://doi.org/10.1111/1758-5899.13294>
- Sarjito, A. (2024). Optimizing the defense logistics transportation system in Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(3), 321–340. <https://doi.org/10.12345/jish.2024.321>
- Setiawan, A. (2021). *Modernisasi doktrin semesta: Adaptasi dan tantangan strategis* (Unpublished manuscript). Universitas Pertahanan Republik Indonesia.
- Smith, M. J. (2018). Realism in an age of uncertainty: Power, politics, and security. *International Relations Quarterly*, 13(2), 145–162.
- Surahman, D., Nugraha, F., & Lestari, S. (2025). Independence of the Indonesian defense industry and challenges in defense budget allocation. *Defense Industry Studies*, 8(1), 17–29. <https://doi.org/10.1016/j.dis.2025.01.004>
- Suryadinata, L. (2020). National resilience and defense policy of Indonesia in the Jokowi era. *ISEAS Perspective*, 43, 1–12.
- Winanti, P. S. (2020). Reordering the extractive political settlement: Resource nationalism and strategic leverage. *The Extractive Industries and Society*, 7(4), 1289–1300. <https://doi.org/10.1016/j.exis.2020.07.005>
- Winkler, S. C. (2023). Strategic competition and U.S.–China relations: A conceptual study. *Chinese Journal of International Politics*, 16(3), 333–358. <https://doi.org/10.1093/cjip/poad012>
- Yusgiantoro, P. (2020). *Ekonomi pertahanan: Teori dan praktik*. Gramedia Pustaka Utama.